

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 20 a TAHUN 2017
TANGGAL : 22 MEI 2017
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2018



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 20 a TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-

- a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2018 :

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Tahun 2018 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2018.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2018, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.

3

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 -2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2018 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2018, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Tahun 2018 dan penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dan memperhatikan RPJMN 2015 - 2019
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

2

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

(2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2018, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2018, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2018 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

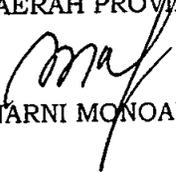
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Mei 2017

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 20.a



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1. LATAR BELAKANG	I.1
	1.2. LANDASAN HUKUM	I.1
	1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I.2
	1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I.3
	1.5. SISTIMATIKA	I.3
BAB II	EVALUASI CAPAIAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II.1
	2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
	2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II.1
	2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II.4
	2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II.16
	2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II.22
	2.1.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH	II.22
	2.1.4.2 INFRASTRUKTUR WILAYAH	II.34
	2.1.4.3 INVESTASI	II.41
	2.1.4.4 SUMBERDAYA MANUSIA	II.42
	2.1.5 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II.42
	2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN BERJALAN	II. 43
	2.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016	II.52
	2.4 MASALAH DAN TANTANGAN POKOK 2018	II.53
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.1
	3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III.1
	3.1.1 KONDISI EKONOMI MAKRO PROVINSI GORONTALO	III.1
	3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018	III.8
	3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.11
	3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III.15
	3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	III.21



BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV.1
	4.1. ARAHAN RPJPD 2007-2025 TERHADAP RKPD 2018	IV.5
	4.2. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	IV.9
	4.3. SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	IV.10
	4.4 PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN	IV.37
	4.5 PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG	IV.38
	4.6 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.39
	4.7 ISU STRATEGIS	IV.42
	4.8 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	IV.43
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017	V.1
	5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	V.1
BAB VI	PENUTUP	VI.1
	LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. GAMBAR 1.1 KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL, DAERAH DAN SKPD	I.2
2. GAMBAR 2.1 PETA PROVINSI GORONTALO	II.2
3. TABEL 2.1 LUAS WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	II.2
4. TABEL 2.2 JUMLAH PENDUDUK GORONTALO 2012 - 2016	II.3
5. TABEL 2.3 KONDISI DEMOGRAFI PROVINSI GORONTALO	II.4
6. TABEL 2.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI GORONTALO	II.5
7. TABEL 2.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN	II.6
8. TABEL 2.6 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	II.6
9. TABEL 2.7 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA DI SEKTOR FORMAL-INFORMAL	II.7
10. TABEL 2.8 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA	II.8
11. TABEL 2.9 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	II.8
12. TABEL 2.10 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	II.10
13. TABEL 2.11 GARIS KEMISKINAN PROVINSI GORONTALO	II.11
14. TABEL 2.12 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015-2016	II.12
15. TABEL 2.13 PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA 2014-2016	II.13
16. TABEL 2.14 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010	II.14
17. TABEL 2.15. LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 2014-2016	II.14
18. TABEL 2.16 ANGKA PARTISIPASI MURNI DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2015-2016	II.17
19. TABEL 2.17 PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN 2012-2016	II.27
20. TABEL 2.18 HUBUNGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI PERIKANAN 2012 - 2016	II.28
21. TABEL 2.19 DATA KERAGAAN KOPERASI PER KABUPATEN/KOTA	II.31
22. TABEL 2.20 PERKEMBANGAN IKM PROVINSI GORONTALO	II.32
23. TABEL 2.21 INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	II.42
24. TABEL 2.22 EVALUASI CAPAIAN MISI SATU RPJMD TAHUN 2016	II.44



25. TABEL 2.23 EVALUASI CAPAIAN MISI DUA RPJMD TAHUN 2016	II.46
26. TABEL 2.24 EVALUASI CAPAIAN MISI KETIGA RPJMD TAHUN 2016	II.48
27. TABEL 2.25 EVALUASI CAPAIAN MISI KEEMPAT RPJMD TAHUN 2016	II.50
28. TABEL 2.26 EVALUASI CAPAIAN MISI KELIMA RPJMD TAHUN 2016	II.51
29. TABEL 2.27 REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN 2016	II.52
30. TABEL 3.1. NILAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 DAN 2016 (TAHUN DASAR 2000)	III.2
31. TABEL 3.2 LAJU PERTUMBUHAN DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010	III.2
32. TABEL 3.3. PDRB PERKAPITA TAHUN DASAR 2010 TAHUN 2014 - 2015	III.3
33. TABEL 3.4 LAJU INFLASI KOTA GORONTALO DESEMBER 2016, TAHUN KALENDER 2016	III.4
34. TABEL 3.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN	III.5
35. TABEL 3.6 GARIS KEMISKINAN PROVINSI GORONTALO	III.7
36. TABEL 3.7 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	III.7
37. TABEL 3.8 PERKIRAAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2017-2018	III.11
38. TABEL 3.10 REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 S/D 2018	III.16
39. TABEL 3.11 REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2016	III.17
40. TABEL 3.12 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN	III.18
41. TABEL 3.13 PROYEKSI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	III.19
42. TABEL 3.14 RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 2016 - 2017	III.20
43. TABEL 3.15 PROYEKSI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT RKPD 2018	III.22
44. TABEL 4.1 MATRIKS ARAHAN RPJPD 2007-2025 TERHADAP RKPD 2018	IV.8
45. TABEL 4.2 SASARAN PRODUKSI KOMODITAS PETANIAN	IV.11
46. TABEL 4.3 SASARAN KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN	IV.13
47. TABEL 4.4 SASARAN PERTUMBUHAN SEKTOR PARIWISATA	IV.13
48. TABEL 4.5 SASARAN KETAHANAN PANGAN	IV.14
49. TABEL 4.6 SASARAN KETAHANAN AIR	IV.17
50. TABEL 4.7 SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK KONEKTIVITAS DAERAH	IV.19



51.	TABEL 4.8 SASARAN PRASARANA DASAR	IV.20
52.	TABEL 4.9 SASARAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	IV.20
53.	TABEL 4.10 SASARAN KETENAGAKERJAAN	IV.21
54.	TABEL 4.11 SASARAN PENINGKATAN INVESTASI	IV.22
55.	TABEL 4.12 SASARAN PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	IV.23
56.	TABEL 4.13 SASARAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT	IV.25
57.	TABEL 4.14 SASARAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	IV.28
58.	TABEL 4.15 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	IV.28
59.	TABEL 4.16 SASARAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	IV.30
60.	TABEL 4.17 SASARAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAN AGAMA	IV.30
61.	TABEL 4.18 SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	IV.32
62.	TABEL 4.19 INDIKATOR PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	IV.36
63.	TABEL 4.20 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2018	IV.44
64.	TABEL 4.21 -PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI	IV.48
65.	TABEL 5.1 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI GORONTALO 2017	V.1

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan transisi yang menjembatani periode RPJMD 2012 – 2017 dengan RPJMD periode 2018 – 2022. Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2016

Tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi menyebutkan bahwa dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan rancangan awal RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan RPJPD periode berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program oleh calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada.

Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018 menjadi penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2018 yang juga merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing - masing SKPD maupun seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana amanah undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan lebih dieksplisitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD ini memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan program - program Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Selanjutnya RKPD akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut :

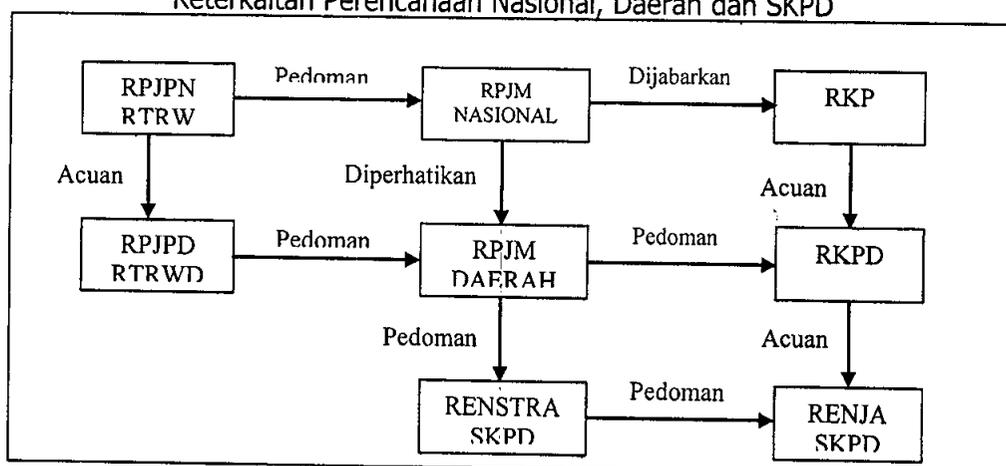
1. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Disamping itu, Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1.1
Keterkaitan Perencanaan Nasional, Daerah dan SKPD





1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJPD 2007 - 2025;
2. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan.

1.5 Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjelasan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah



Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 sebagai tahun terakhir periode RPJMD 2012-2017

2.3 Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015-2016.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2018

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2018 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2018.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2018, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2018, SKPD pelaksana, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

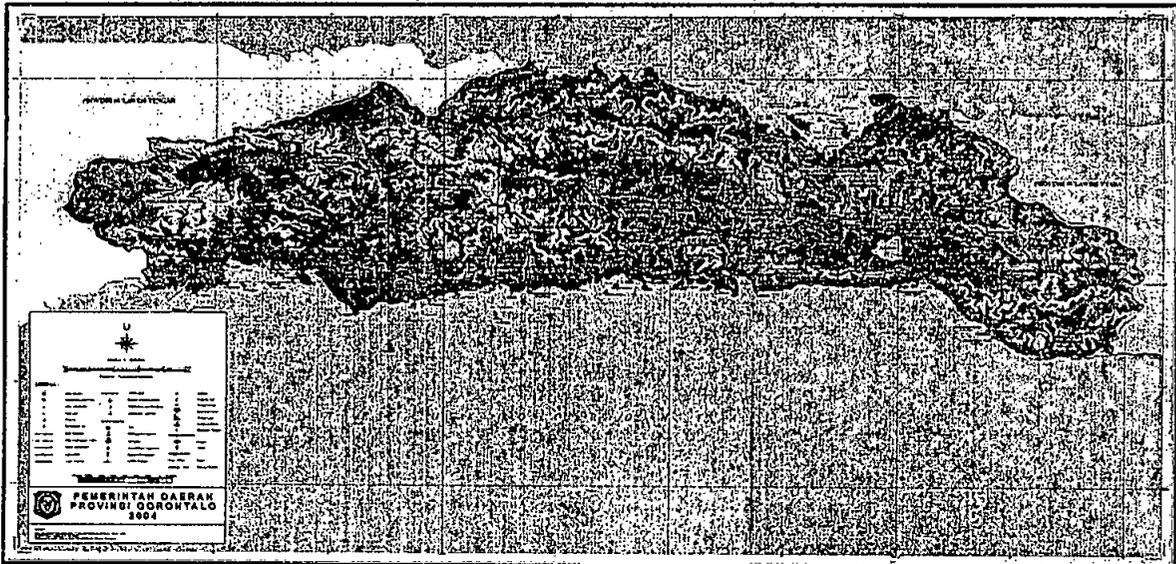
Menurut sejarah, jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare - Pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat disekitar wilayah seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2001, wilayah Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo sebagai provinsi yang ke 32 secara geografis terletak diantara antara $0^{\circ} 19' - 0^{\circ} 57'$ Lintang Utara dan $121^{\circ} 23' - 125^{\circ} 14'$ Bujur Timur, yang diapit oleh Laut Sulawesi di sebelah Utara, Provinsi Sulut di sebelah Timur, Teluk Tomini di sebelah Selatan, dan Provinsi Sulteng di sebelah Barat. Awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota.

Wilayah Gorontalo terletak di antara $0^{\circ}19' - 1^{\circ}15'$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23' - 123^{\circ}43'$ Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo



Wilayah Provinsi Gorontalo dengan Luas 12.215,44 km², hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah administrasi pemerintahan, yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km².

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Sumber Data
01	Kabupaten Gorontalo	2.207,58	18,07	UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007
02	Kabupaten Boalemo	2.517,36	20,61	UU No. 50 Thn 1999 dan UU No. 6 Thn 2003
03	Kabupaten Pohuwato	4.244,31	34,75	UU No. 6 Thn 2003
04	Kabupaten Bonbol	1.889,04	15,46	UU No. 6 Thn 2003
05	Kabupaten Gorontalo Utara	1.676,15	13,72	UU No. 11 Thn 2007
06	Kota Gorontalo	66,25	0,54	UU No. 29 Thn 1959 dan UU No. 22 Thn 1999
Provinsi Gorontalo		12.215,44	100	UU No. 38 Thn 2000

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda.



Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung yang terendah. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 berpenduduk sebanyak 1.150.765 jiwa. Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 35,03 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

Tabel. 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2012-2016

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
01	Kab. Gorontalo	368.053	365.781	368.149	370.441	372.856
02	Kab. Boalemo	136.269	141.547	145.580	149.832	154.008
03	Kab. Pohuwato	135.338	139.675	143.338	146.896	150.385
04	Kab. Bone Bolango	147.692	148.971	151.094	153.166	155.238
05	Kab. Gorontalo Utara	108.079	108.324	109.502	110.700	111.824
06	Kota Gorontalo	188.761	193.692	197.970	202.202	206.454
Provinsi Gorontalo		1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 66,25 Km² namun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan kepadatan penduduk mencapai 3.116 jiwa/km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 35 jiwa/km² dengan luas wilayah 4.244,31 km².

Dengan total wilayah Provinsi Gorontalo yang seluas 12.215,44 km² memiliki kepadatan penduduk mencapai 94,21 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo mencapai mencapai 1,55 %, sedangkan sex ratio sebesar 100,38 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,38 penduduk laki-laki, dengan rincian sebagaimana table 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Demografi Provinsi Gorontalo 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.084.192	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765
- Laki – Laki	Jiwa	543.086	550.004	558.862	567.695	567.482
- Perempuan	Jiwa	541.106	547.986	556.771	565.542	574.283
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,09	1,27	2,89	1,55	1,55
Kepadatan Penduduk	Org/Km ²	87	88	90	92	94,21
Sex Ratio	%	100,36	100,37	100,38	100,38	100,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), yang merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks standar hidup. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, dan selanjutnya metode perhitungannya direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik mengadopsi metodologi perhitungan IPM yang baru mulai tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

Perubahan mendasar dalam perhitungan IPM dengan metode baru mencakup penggunaan indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) dalam perhitungan indeks pendidikan dan penggunaan indikator pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita menggantikan produk domestik bruto (PDB) per kapita dalam perhitungan indeks standar hidup.

Beberapa perubahan tersebut menjadikan IPM dengan metode baru memiliki sejumlah keunggulan dibanding IPM yang dihitung dengan metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Hasil perhitungan IPM se-Provinsi Gorontalo dengan menggunakan metode baru tahun dasar 2010 diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo
Tahun 2014-2015

Provinsi/ Kab/Kota	Angka Harapan Hidup		Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(tahun)		(tahun)		(tahun)		(ribu rupiah PPP)		2014	2015
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
Boalemo	67.29	67.49	11.89	12,07	6.12	6.15	7598	7817	62.18	62.86
Gorontalo	66.53	66.63	11.89	11.99	6.31	6.53	8032	8398	62.90	63,63
Pohuwato	62.33	62.43	11.68	12,03	6.53	6.54	8925	9146	61.74	62,50
Bone Bolango	67.50	67.60	12.33	12,76	7.67	7.70	8669	8900	66.03	66.83
Gorontalo Utara	64.79	64.99	11.68	11,96	6.53	6.59	7999	8178	61.92	62,55
Kota Gorontalo	71.68	71.69	13.76	14,18	10.24	10.28	11019	11269	74.97	75,62
PROVINSI GORONTALO	67.00	67.12	12.49	12,70	6.96	6.97	8762	9035	65.17	65.86

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2016

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo. Pada Tahun 2015, IPM Provinsi Gorontalo telah mencapai 65,86. Angka ini meningkat sebesar 0,69 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 65,17. Pada tahun 2015 capaian Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo berstatus "sedang", masih sama dengan status yang dicapai tahun 2014.

Selama periode 2014 hingga 2015, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Angka harapan hidup Provinsi Gorontalo tahun 2015 hingga 67,12 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,70 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,05 tahun, meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 9,04 juta rupiah pada tahun 2015, atau meningkat Rp. 273 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 62,50 (Kabupaten Pohuwato) hingga 75,62 (Kota Gorontalo). Pada dimensi Angka Harapan Hidup berkisar antara 62,43 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 71,69 tahun (Kota Gorontalo), untuk dimensi Angka Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,96 tahun (Kabupaten Gorontalo Utara) hingga 14,18 tahun (Kota Gorontalo), Sementara untuk Rata-rata Lama sekolah berkisar antara 6,23 tahun (Kabupaten Boalemo) hingga 10,29 tahun (Kota Gorontalo). Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan di tingkat Kabupaten/Kota berkisar antara 7,82 juta rupiah pertahun (kabupaten Boalemo) hingga 11,27 juta rupiah pertahun (Kota Gorontalo).



b. Ketenagakerjaan

Dari sisi capaian ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mencapai 562.196 orang, berkurang 1.206 orang dari keadaan Februari Tahun 2016 sebesar 563.402 orang, atau bertambah 44.408 orang dari keadaan Agustus 2015 sebesar 517.788 orang. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari Agustus 2015 -- Agustus 2016 ini disebabkan proporsi penduduk usia kerja yang masuk pasar kerja mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan TPAK ini belum cukup diimbangi penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2016 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 546.668 orang, berkurang 5.119 orang dari keadaan Februari 2016 sebesar 541.549 orang, namun bertambah 52.981 orang dari keadaan Agustus 2015 yang sebesar 493.687 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Agustus 2016 sebesar 15.528 orang, berkurang 6.325 orang dari keadaan Februari 2016 yang sebesar 21.853 orang, dan berkurang 8.573 orang dari keadaan Agustus 2015 sebesar 24.101 orang.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada Agustus 2016 sebesar 2,76 persen (dari angkatan kerja). Hal ini menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang sangat signifikan dibandingkan TPT Februari 2016 sebesar 3,88 persen atau TPT Agustus 2015 sebesar 4,65 persen. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan

Kegiatan Utama	2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Angkatan Kerja	534.012	517.788	563.402	562.196
Bekerja	517.687	493.687	541.549	546.668
Pengangguran	16.325	24.101	21.853	15.528
Bukan Angkatan Kerja	270.619	295.718	257.849	265.935
Sekolah	70.311	78.825	79.484	75.928
Mengurus Rumah Tangga	166.751	185.526	152.535	168.119
Lainnya	33.557	31.367	25.830	21.888
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas	804.631	813.506	821.251	828.131
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,06	4,65	3,88	2,76
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,37	63,65	68,60	67,89

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2017

Jika dilihat dari lapangan usaha, maka sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 30,63 persen atau 167.445 jiwa dari total penduduk yang bekerja, Sedangkan sektor industri sebesar 7,44 persen atau 40.665 jiwa, di sektor perdagangan 20,01 persen atau sebesar 109.389 jiwa, sektor jasa kemasyarakatan 25,09 persen 137.175 jiwa

dan sektor lainnya 16,83 persen atau 91.994 jiwa, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel. 2.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2014-2016

Lapangan Pekerjaan Utama	2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	169.345	188.033	174.931	171.104	154.644	167.445
Industri	19.196	41.165	40.789	35.684	48.891	40.665
Perdagangan	104.106	84.147	108.775	97.500	122.875	109.389
Jasa Masyarakat	104.443	85.080	115.787	102.859	104.633	137.175
Lainnya	110.849	80.712	77.405	86.540	110.506	91.994
Total	507.939	479.137	517.687	493.687	541.549	546.668

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2017

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal, Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2016 tercatat 216.948 orang atau 39,69 persen pekerja di Gorontalo bekerja pada kegiatan formal dan 329.720 orang atau 60,31 persen bekerja pada kegiatan informal.

Tabel 2.7
Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal- Informal Provinsi Gorontalo, 2014-2016

Sektor Formal- Informal	2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Formal	190,698	160,122	176,523	183,333	205.875	216.948
Informal	317,241	319,015	341,164	310,354	335.674	329.720
Jumlah	507,939	479,137	517,687	493,687	541.549	546.668

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2017

Dari orang yang bekerja pada Agustus 2016, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah buruh/karyawan/pegawai yaitu 196.671 orang atau 35,98 persen, diikuti berusaha sendiri sejumlah 131.916 orang atau 24,13 persen, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 87.761 orang atau 16,05 persen, sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 20.277 orang atau 3,71 persen.

Tabel 2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Status Pekerjaan Utama 2014-2016

Status Pekerjaan Utama	2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	133,799	114,649	121,900	124,472	127.989	131.916
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	73,686	79,911	88,285	70,515	84.928	87.761
Berusaha dibantu Buruh Tetap	15,205	16,316	19,333	19,155	28.503	20.277
Buruh/Karyawan/Pegawai	175,493	143,806	157,190	164,178	177.372	196.671
Pekerja Bebas di Pertanian	23,821	31,366	22,470	59,657	21.459	25.661
Pekerja Bebas di Non Pertanian	25,366	27,389	25,038	27.220	24.728	20.756
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	60,569	65,700	83,471	55,710	76.570	63.626
Jumlah	507,939	479,137	517,687	493,687	541.549	546.668

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Pada Agustus 2016, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 76.896 orang atau 14,07 persen.

Tabel 2.9
Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan 2014-2016

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2014		2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= SD	311,270	300,343	297,908	281,462	292.861	281.607
SMP - SMA	142,556	132,851	157,060	158,284	193.133	188.165
Universitas	54,113	45,943	62,719	53,941	55.555	76.896
Jumlah	507,939	479,137	517,687	493,687	541.549	546.668

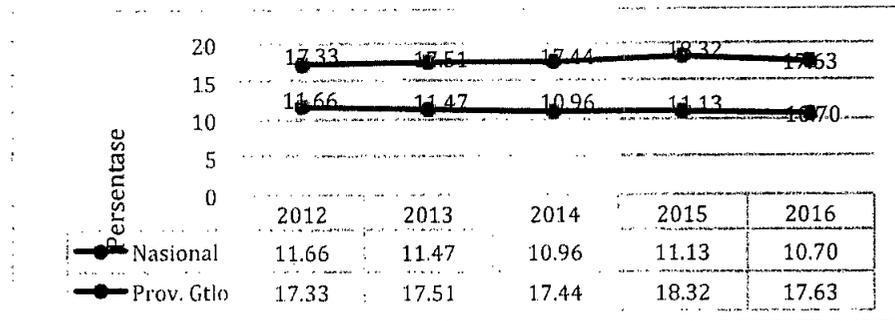
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

c. Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur oleh indikator kemiskinan. Data sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diperoleh data selama kurun waktu 5 tahun terjadi fluktuasi angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan angka kemiskinan yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan BBM serta kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil. Namun demikian tahun 2016 kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana tahun 2015 persentase angka

kemiskinan sebesar 18,32 persen, turun menjadi 17,63 persen tahun 2016 atau sebesar 0,69 persen.

Grafik 2.1
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 sebesar 17,72 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,09 persen pada September tahun 2016 sebesar 17,63 persen. Jumlah penduduk miskin September 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203,69 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2016 sebanyak 203,19 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret - September 2016 bertambah sebanyak 500 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan. Penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 60 jiwa, sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 560 jiwa. Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2016 sebesar 88,21 persen berada di pedesaan, sisanya 11,79 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin.

Dari data sebaran kemiskinan kabupaten/Kota se-Provinsi, maka dapat dilihat bahwa jumlah kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu untuk tahun 2016 sebesar 80,42 ribu penduduk miskin, sementara jumlah penduduk miskin terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 11.95 ribu penduduk. Namun jika dilihat dari persentase kemiskinan menunjukkan bahwa persentase tertinggi berada di Kabupaten Boelamo untuk tahun 2016 sebesar 21,79 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 21,67 persen dan terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,79 persen, yang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2015-2016

No	Kab/Kota	Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	Kab. Boalemo	32.19	21,67	33,55	21,79
2.	Kab. Gorontalo	80.52	21,80	80.42	21,57
3.	Kab. Pohuwato	32.70	22,43	32.28	21,47
4.	Kab. Bone Bolango	28,19	18,49	26.68	17,19
5.	Kab. Gorontalo Utara	21.06	18,93	22.32	19,96
6.	Kota Gorontalo	12.18	6,05	11.95	5,79
	Provinsi Gorontalo	206.84	18,32	202.88	17,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Sementara itu terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukup berhasilnya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga pada tahun 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 18,32 persen menjadi 17,63 persen atau sebesar 0,69 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjadi 2.787 pada September 2016, yang sebelumnya 4,116 pada Maret 2016. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2016 sebesar Rp 284.232 per kapita per bulan dan pada September 2016 menjadi Rp 286.968 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp. 2.736 per kapita per bulan atau naik sebesar 0,96 persen.

Pada September 2016, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp 211.756/kapita/bln dan perdesaan sebesar Rp. 226.546 /kapita/bln. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp 75.400 /kapita/bln dan perdesaan sebesar Rp 59.453 /kapita/bln, maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal

ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih dibandingkan wilayah perdesaan.

Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2016 sebesar Rp. 287.156 / per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp. 285.999 per kapita per bulan, dengan total garis kemiskinan Provinsi baik perkotaan dan pedesaan pada September 2016 sebesar Rp. 286.968 perkapita perbulan.

Tabel 2.11
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah
Tahun 2016

Rincian	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2015	209.232	75.076	284.308
September 2015	211.756	75.400	287.156
Perubahan (%)	1,21	0,43	1,00
Perdesaan			
Maret 2015	224.958	59.232	284.190
September 2015	226.546	59.453	285.999
Perubahan (%)	0,71	0,37	0,64
Kota+Desa			
Maret 2015	219.469	64.764	284.232
September 2015	221.772	65.196	286.968
	1,05	0,67	0,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

2.1.2.2. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebesar 6,52 persen, mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding tahun 2015 sebesar 6,22 persen. Pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,45 persen, diikuti oleh Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 14,92 persen dan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,04. Struktur PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tidak menunjukkan perubahan yang berarti yang masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan perikanan (37,44 persen); Konstruksi (12,00 persen); dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,95 persen).

Jika dilihat sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016, Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,34 persen, diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 persen; dan Kategori Jasa Keuangan sebesar 0,68 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 mengalami kontraksi 3,36 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi 12,26 persen. Selain itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil, Transportasi dan Pergudangan juga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,63 persen; 0,21 persen dan 0,97 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,52 persen terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali Ekspor dan Impor. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,35 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 6,75 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,52 persen.

Struktur Ekonomi Gorontalo tahun 2016 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (60,62 persen), diikuti Impor Barang dan Jasa (40,25 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (30,53 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi gorontalo tahun 2016, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 4,09 persen; diikuti PMTB sebesar 1,83 persen.

Tabel 2.12
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2015-2016 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		Triw IV-2015	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw IV-2015	Triw III-2016	Triw IV-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 516,73	3.307,87	2.910,05	1 849,04	2.362,01	2.072,43
B	Pertambangan dan Penggalian	98,17	95,52	102,13	77,08	73,41	78,37
C	Industri Pengolahan	313,31	340,45	337,40	225,08	238,42	236,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,85	3,66	3,84	3,93	4,82	5,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,82	4,48	4,56	2,77	3,17	3,21
F	Konstruksi	990,10	963,59	1.009,38	745,59	716,96	746,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	801,04	903,63	895,93	584,76	642,39	641,07
H	Transportasi dan Pergudangan	472,50	510,09	503,67	340,62	362,61	359,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	170,71	184,34	189,10	125,74	133,91	136,98
J	Informasi dan Komunikasi	191,43	211,47	215,18	166,56	180,38	184,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	282,88	330,40	356,53	212,09	242,24	258,57
L	Real Estate	144,75	155,58	159,35	112,07	116,26	119,12
M,N	Jasa Perusahaan	7,38	7,95	8,02	5,44	5,72	5,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	640,05	596,71	615,09	526,77	483,48	501,86
P	Jasa Pendidikan	322,46	318,99	339,23	253,53	246,76	255,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271,79	289,46	290,99	209,42	219,38	220,21
R,S	Jasa lainnya	126,82	131,50	132,98	101,09	103,57	104,64



T,U							
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7.356,01	8.355,70	8.073,42	5.541,58	6.135,51	5.929,63	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2014-2016 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9 511,57	10 584,22	11.916,05	7 698,32	8 026,19	8.540,21
B	Pertambangan dan Penggalian	331,42	375,72	380,96	283,11	294,31	294,53
C	Industri Pengolahan	1 051,50	1 191,32	1.333,94	843,70	883,01	941,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,71	10,08	12,99	15,29	15,55	17,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,76	14,01	16,94	10,25	10,50	12,06
F	Konstruksi	2 971,32	3 525,79	3.820,19	2 470,12	2 711,44	2.849,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 624,85	2 997,64	3.484,22	2 151,87	2 275,61	2.500,71
H	Transportasi dan Pergudangan	1 535,45	1 790,68	1.974,18	1 207,88	1 324,74	1.410,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	540,44	639,59	721,03	446,92	482,90	524,98
J	Informasi dan Komunikasi	631,10	721,78	828,34	587,23	644,77	710,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	930,75	1 077,03	1.316,27	742,57	817,90	968,83
L	Real Estate	463,94	541,92	617,52	396,25	428,83	464,45
M,N	Jasa Perusahaan	24,30	28,07	31,20	20,19	21,32	22,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2 214,14	2 358,85	2.422,50	1 906,73	1 978,49	1.976,63
P	Jasa Pendidikan	1 051,89	1 186,51	1.288,66	894,72	958,61	994,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	862,82	1 014,32	1.144,74	726,38	803,68	871,82
R,S, T,U	Jasa lainnya	423,69	478,63	513,92	374,18	392,59	406,47
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		25 193,65	28 536,15	31.823,65	20 775,70	22 070,45	23.507,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Jika dibandingkan antara triwulan IV-2016 terhadap triwulan triwulan IV-2015 (y-on-y), maka terjadi pelambatan sebesar 0,63 persen, yaitu dari 7,65 persen (tw.IV 2015) menjadi 7,02 persen (tw.IV 2016). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 27,82 persen, diikuti Jasa Keuangan sebesar 21,91 persen, dan pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 16,12 persen.

Struktur perekonomian Gorontalo pada triwulan IV-2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (36,04 persen); Konstruksi (12,50 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (11,10 persen). Sumber utama pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan IV-2016 adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,04 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 persen; dan Kategori Jasa Keuangan 0,84 persen.



Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 (persen)

Lapangan Usaha		Tw. IV-2016 terhadap Tw. III- 2016	Triw IV- 2016 Terhadap Triw IV 2015	Kumulatif Tw. IV-2016 terhadap Kumulatif Tw. IV-2015	Sumber Pertumbuha n Tw. IV- 2016 (y-on-y)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-12,26	12,12	6,43	4,04
B	Pertambangan dan Penggalian	6,76	1,67	0,08	0,02
C	Industri Pengolahan	-0,63	5,22	6,58	0,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,28	27,82	12,04	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,20	16,12	14,92	0,01
F	Konstruksi	4,16	0,16	5,09	0,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,21	9,70	9,91	1,02
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,97	5,43	6,47	0,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	8,94	8,71	0,20
J	Informasi dan Komunikasi	2,33	10,82	10,23	0,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,74	21,91	18,45	0,84
L	Real Estate	2,46	6,29	8,31	0,13
M,N	Jasa Perusahaan	0,74	5,96	5,91	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,80	-4,73	-0,09	-0,45
P	Jasa Pendidikan	3,34	0,58	3,78	0,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	5,15	8,48	0,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,03	3,51	3,54	0,06
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-3,36	7,02	6,52	7,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan
Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2014-2016 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan			
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	4,24	6,43	2,40	1,57	2,34
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,95	0,08	0,05	0,05	0,00
C	Industri Pengolahan	6,00	4,66	6,58	0,25	0,19	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,46	1,72	12,04	0,01	0,00	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,34	2,46	14,92	0,00	0,00	0,01
F	Konstruksi	7,85	9,77	5,09	0,93	1,16	0,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,05	5,73	9,91	0,83	0,59	0,39
H	Transportasi dan Pergudangan	8,57	9,67	6,47	0,49	0,56	0,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,93	8,05	8,71	0,15	0,17	0,19
J	Informasi dan Komunikasi	9,02	9,80	10,23	0,25	0,28	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,54	10,15	18,45	0,17	0,36	0,68
L	Real Estate	7,85	8,22	8,31	0,15	0,16	0,16
M,N	Jasa Perusahaan	5,96	5,57	5,91	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,92	3,76	-0,09	0,64	0,35	-0,01
P	Jasa Pendidikan	13,55	7,14	3,78	0,55	0,31	0,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,84	10,64	8,48	0,30	0,37	0,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,28	4,92	3,54	0,10	0,09	0,06
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7,27	6,23	6,52	7,27	6,22	6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2017

2.1.2.3. Kesejahteraan Sosial

Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT, melakukan penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Penanganan dilakukan melalui pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Di tahun 2016

penanganan Masyarakat Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan terhadap 917 orang PMKS yang dibagi menjadi masing-masing kegiatan yaitu pemberian pelayanan kepada penyandang cacat, perlindungan sosial kepada anak terlantar, pemberian pelayanan bagi lansia, rehabilitasi sosial kepada penyandang tuna sosial. Pemberian layanan terhadap masyarakat miskin untuk 1.220 KK (244 KUBE) serta pembangunan 2 unit MCK dan 8 Paket sarana penunjang dilokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berjumlah 403 KK. Disamping itu, dilakukan layanan dan pembinaan terhadap pilar - pilar kesejahteraan sosial masyarakat bagi 43 lembaga sosial masyarakat atau sebanyak 77 orang.

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi berupaya melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, kesehatan gratis, perlindungan sosial bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya serta program-program lainnya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan sosial, beasiswa miskin dan lain sebagainya.

2.1.2.4. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisan program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Hingga tahun 2016, jumlah organisasi pemuda yang terdapat di Provinsi Gorontalo masih sebanyak 34 kelompok, sedangkan organisasi olahraga berjumlah 24 kelompok.

Dari upaya pengembangan prestasi pemuda dan olahraga, Provinsi Gorontalo selama tahun 2016 telah berpartisipasi dalam berbagai event baik nasional maupun internasional. Tercatat bahwa 19 medali yang diraih Provinsi Gorontalo dari beberapa cabang olahraga, diantaranya karate, tenis meja, pencak silat, sepak takraw, dan bulu tangkis.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit

unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus di genjot oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Tahapan dan penjenjangan pembinaan peningkatan prestasi siswa dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi, hingga ke tahap Nasional dan Internasional. Jenis lomba dan pertandingan berupa Lomba O2SN (olimpiade olahraga siswa nasional), OSN (olimpiade sains nasional), FLS2N (festifal lomba seni siswa nasional), olimpiade matematika, dan lainnya.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pembangunan sektor pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal diantaranya adalah: Program PAUD, program pendidikan dasar, program pendidikan menengah, program pendidikan untuk kesetaraan, masyarakat, kursus dan kelembagaan dan program pendidikan khusus serta pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin. Kemudian melalui program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA) pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mempercepat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun.

Dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan tersebut capaian sektor pendidikan hingga tahun 2016 relatif cukup baik. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2016, untuk SD/MI sebesar 111,40 persen, SMP/MTs sebesar 99,75 persen, dan SMA/MA/SMK sebesar 93,54 persen. Jika dibandingkan tahun 2015, APK SD/MI sebesar 114,23, APK SMP/MTs sebesar 98,85 dan SMA/MA/SMK sebesar 89,92, maka terjadi peningkatan Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs sebesar 0,9 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 3,62 persen. Sementara untuk APK SD/MI mengalami penurunan sebesar 2,83 persen.

Sementara untuk APK PAUD dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan. Capaian Tahun 2015 sebesar 52,9 %. Pada tahun 2016 Indikator Kinerja ini sudah melebihi yang ditetapkan yaitu dengan target 53,19 % dan capaian hasil 53,44 %. Indikator kinerja pendukung dalam upaya meningkatkan APK tersebut dilakukan melalui penyediaan 736 TK, 37 buah RA dan Kelompok Bermain (KB) 985 buah, Tempat Penitipan Anak (TPA) 60 lembaga, SPS sebanyak 198 lembaga, sehingga total lembaga PAUD 2.016 lembaga.

Indikator lainnya menunjukkan pembangunan pendidikan yang dilihat dari Angka Partisipasi Murni, dimana pada tahun 2016 untuk APM SD/MI sebesar 98,34

persen, SMP/MTs sebesar 75,43 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 76,13 persen. Jika dibandingkan dengan pencapaian APM tahun 2015, dimana untuk APM SD/MI sebesar 101,66 persen, SMP/ MTs sebesar 74,80 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 71,34 persen, maka terjadi peningkatan Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK masing-masing sebesar 0,63 persen dan 4,79 persen, sementara untuk SD/MI mengalami penurunan sebesar 3,32 persen. Pencapaian APM untuk SD/MI dan SMA/MA/SMK tahun 2016 telah memenuhi target, sementara SMP/MTs belum mencapai target RPJMD (2012-2017) untuk tahun 2016, yang dapat diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar
Provinsi Gorontalo tahun 2015-2016

No	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		2015	2016	2015	2016
1.	SD/MI	101,66	98,34	114,23	111,40
2.	SMP/MTs	74,80	75,43	98,85	99,75
3.	SMA/MA/SMK	71,34	76,13	89,92	93,54

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2017

Sementara itu, melalui program peningkatan pendidikan formal maupun non formal diperoleh capaian peningkatan angka melek huruf pada tahun 2016 menjadi 99,81 persen, capaian tersebut lebih baik dari tahun 2015 yang mencapai 99,71 persen. Dalam kebijakan penerapan pendidikan gratis atau lebih dikenal dengan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) di tahun 2015 telah mengakomodir siswa SMA/MA/SMK sederajat sebanyak 47.124 siswa yang memperoleh bantuan operasional sekolah, jumlah tersebut terdiri dari SMA Negeri dan Swasta sebanyak 26.893 siswa, untuk SMK Negeri dan Swasta sebanyak 18.287 siswa, untuk MA Negeri sebanyak 1.784 siswa dan untuk SMALB sebanyak 160 siswa. Namun untuk tahun 2016 sebagaimana Permendagri 52 tahun 2016 tentang Penyusunan APBD 2016 bantuan operasional sekolah dialihkan menjadi bantuan hibah barang berupa perlengkapan sekolah, meubelair. Disamping itu melalui program yang sama diberikan insentif untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, untuk tenaga pendidik PKLK, insentif tenaga kependidikan PKLK, insentif guru daerah terpencil dan insentif untuk guru kontrak dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.572 orang tahun 2015 dan 2.107 orang guru pada tahun 2016 yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Untuk pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan, terus dilakukan melalui Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Desa/ Kelurahan, swasta dan masyarakat, Pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan, Melaksanakan sosialisasi/ pasyarakat berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perpustakaan dan kearsipan, Peningkatan



pelayanan perpustakaan dan arsip, Melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya bangsa melalui preservasi, konservasi, restorasi, Menyediakan bahan pustaka melalui pembelian, hibah/ sumbangan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak. Dari upaya - upaya tersebut pada tahun 2016 jumlah pengunjung mencapai 260.321 orang telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 7.000 orang, untuk jumlah buku ditahun 2016 sebanyak 348.042 Eksemplar, sedangkan koleksi buku dan judul terbitan daerah sebanyak 30 judul. Pada tahun 2016 jumlah pustakawan berjumlah 2 orang dan tenaga teknis perpustakaan berjumlah 15 orang yang bertugas dalam pengolahan buku, pemegang kelas bahan pustaka dan IT perpustakaan. Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam hal kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo telah menganggarkan kegiatan peningkatan SDM khususnya pelatihan dan diklat pustakawan/tenaga teknis perpustakaan kepada 90 orang tenaga pengelola kearsipan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap pemustaka (masyarakat) dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan. Melalui upaya tersebut status kesehatan dan gizi masyarakat terus membaik, yang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja urusan kesehatan, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang mengalami peningkatan, yang semula 67,00 tahun pada Tahun 2014 menjadi 67,12 tahun pada Tahun 2015. Namun demikian, jika dilihat dari indikator kinerja kesehatan khususnya untuk Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami peningkatan dimana AKB tahun 2016 sebesar 15,0 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan posisi tahun 2015 sebesar 11,6 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tahun 2016 belum melampaui capaian target RPJMD 2012-2017 yaitu 12,8 per 1.000 kelahiran hidup.

Faktor yang mempengaruhi antara lain jarak dan transportasi ke tempat pelayanan kesehatan yang jauh, lingkungan yang tidak ber-PHBS seperti tinggal di lingkungan yang tidak sehat (kebiasaan merokok di dalam rumah, ventilasi rumah kurang memenuhi syarat untuk sirkulasi dan pencahayaan), asupan gizi seperti pemberian MP- ASI terlalu dini, pemberian MP-ASI tidak sesuai umur, kualitas MP-ASI kurang baik/tidak memenuhi kebutuhan gizi, penggunaan susu formula, terutama karena botol susu dan dot kurang bersih, minum air mentah/tidak dimasak, makanan dan minuman tercemar kuman penyakit, pemberian ASI kurang memadai, imunisasi yang tidak lengkap, faktor perilaku ibu dan keluarga seperti

pada saat ibu hamil sering mengkonsumsi obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok atau sering menghirup asap rokok (perokok pasif) dan adanya penyakit infeksi.

Sama halnya dengan Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2016 sebesar 16,3 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 12,8 per 1.000 kelahiran hidup, dan belum mencapai target RPJMD untuk 2016 sebesar 16,2 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian balita di Provinsi Gorontalo antara lain disebabkan oleh Diare : 20%, Ispa : 8%, Typhoid : 4%, Kelainan saluran cerna : 4%, Lain-lain : 64%.

Demikian halnya untuk angka kematian neonatal tahun 2016 sebesar 11,0, meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 8,0. Penyebabnya diantaranya adalah Berat bayi lahir rendah (BBLR) karena ibu hamil kurang gizi, kurang darah, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, Afiksia (pendarahan saat hamil dan persalinan), serta penyebab lainnya yaitu kelainan kongenital yang dipengaruhi oleh sering mengkonsumsi obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan, kemungkinan ibu merokok atau sering menghirup asap rokok

Tantangan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang ditandai masih tingginya angka kematian ibu (AKI) tahun 2015 yang mencapai 253,4 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 301,7 per 100.000 kelahiran hidup (November 2016) masih jauh dari target RPJMD tahun 2016 yaitu 102,0 per 100.000 KH. Meningkatnya Angka Kematian Ibu diantaranya disebabkan oleh kondisi fisik dan kesehatan Ibu Hamil seperti anemia, infeksi, kekurangan energi kronik (KEK), hipertensi, malaria dan atau pendarahan *post partum*. Selain itu dipengaruhi oleh faktor umur ibu hamil yakni (1) terlalu muda < 20 tahun, (2) terlalu tua > 35 tahun, (3) terlalu dekat jarak kehamilan dan (4) terlalu banyak anak.

Sementara itu untuk prevalensi kekurangan gizi tahun 2015 sebesar 24,5 point untuk tahun 2015, belum mencapai target RPJMD untuk tahun 2015 sebesar 13,78% dan tahun 2016 sebesar 22,25% dari yang ditargetkan sebesar 13,56% tahun 2016 . Perbaikan status gizi masyarakat antara lain melalui perbaikan status gizi anak balita. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi, tercatat Persentase Balita Gizi Buruk tahun 2016 sebesar 4,56% menurun dibanding tahun 2015 sebesar 5,7 persen. Namun demikian masih belum mencapai target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 3,34 persen. Kondisi ini menunjukkan status gizi masyarakat perlu menjadi perhatian dan intervensi program kegiatan untuk mendorong peningkatan gizi masyarakat. Dari upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan gizi buruk di Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa Tingkat capaian indikator kinerja persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dengan indikasi medis maupun tanpa indikasi medis yang terdeteksi telah dirawat, baik itu rawat inap di



TFC, puskesmas perawatan dan di rumah sakit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan dan rumah sakit pada tahun 2016 telah mencapai target 100% dengan kata lain seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan.

Pemanfaatan akses air bersih dan kelayakan sanitasi untuk meningkatkan hidup bersih dan layak nya kehidupan masyarakat juga terus dikembangkan, dimana untuk melihat tingkat kelayakan hidup penduduk yang sehat dapat dilihat dari Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat di provinsi Gorontalo tahun 2014 yaitu 42,5% meningkat di tahun 2015 menjadi 63,8% dan tahun 2016 meningkat mejadi 69,5% sebagaimana target yang ditetapkan tahun 2016 yakni 69,56%. Sementara untuk persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar di Provinsi Gorontalo tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu 56,27, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 50,27%. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 63,5%.

Sasaran pembangunan bidang kesehatan lainnya ditandai dengan Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS di rumah tangga sangat penting peranannya dalam dalam mencegah penyakit baik penyakit non menular (seperti gizi buruk, gizi kurang, masalah ibu hamil dan bersalin) maupun penyakit menular (seperti flu, dimana virus penyebabnya akan mati dengan sabun/detergen). Terwujudnya peningkatan perilaku masyarakat yang ber PHBS, khususnya pada tatanan rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Jumlah rumah tangga yang ber PHBS berdasarkan hasil pemantauan terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2016 mencapai 73,7 % dari jumlah yang di pantau menjadi 74% di tahun 2016.

Untuk membantu peningkatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi melalui program Jamkesta telah membantu pelayanan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Untuk tahun 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan jamkes kepada 220.000 jiwa, dengan total anggaran Jamksesta sebesar Rp. 60.747.926.339.

Untuk ketersediaan tenaga medis per 1000 penduduk Tahun 2016 rasionya untuk dokter spesialis mencapai 0,04 dari yang ditargetkan sebesar 0,06, dokter gigi 0,03 dari target sebesar 0,04, dokter umum 0,14 dari target yang ingin dicapai sebesar 0,29, perawat sebesar 0,85 dari target sebesar 1,49, bidan 0,69 dari yang ditargetkan sebesar 0,91, apoteker sebesar 0,04 dari target sebesar 0,07 dan nutrisionis sebesar 0.17, dari target 0,33 . Dari kondisi tersebut terlihat bahwa Gorontalo masih sangat kekurangan Tenaga kesehatan.

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 terdiri dari RSUD sebanyak 9 unit, RS Swasta 4 unit, sehingga total Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo sejumlah 13 unit, dengan rasio per 1.000 penduduk sebesar



0,011, Puskesmas 93 unit dengan rasio 0,08 per 1.000 penduduk. Sementara Puskesmas pembantu sejumlah 232 unit, Puskesmas keliling 86 unit, dan Posyandu sebanyak 1.308, dan Desa Siaga aktif sebanyak 525.

c. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo dari tahun 2016 sebesar 72,09, dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar 87. Hal ini disebabkan mulai tahun 2015 terjadi perubahan formula perhitungan dan penambahan jumlah parameter oleh Kementerian yang menyebabkan pergeseran nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tahun 2014, IKLH Provinsi Gorontalo sebesar 98.73, namun setelah perubahan perhitungan tahun 2015 IKLH menjadi 72,09, sementara penentuan target IKLH terlalu tinggi masih menggunakan parameter yang lama. Disamping itu tekanan lingkungan pada tahun ini juga relative meningkat setiap tahunnya. Pencapaian nilai IKLH tersebut akan terus ditingkatkan dengan tingkat capaian sampai akhir RPJMD (2017) sebesar 90.

Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup masih sangat parsial, belum ada program yang mengintegrasikan beberapa sektor terkait untuk bersinergi dalam satu lokus sasaran dan target lokasi sehingga hasil pencapaian kinerja dapat lebih optimal. Hal lainnya adalah ketersediaan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung seperti laboratorium lingkungan yang belum tersedia serta anggaran yang sifatnya masih terbatas, menyebabkan pengelolaan lingkungan di Gorontalo belum terlalu efektif. Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup di tahun 2016 dilakukan melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melalui penyusunan Dokumen dan Perda RPPLH serta salah satu program pengembangan riset daerah melalui kegiatan penelitian Evaluasi Status Capaian & Implementasi CTI di Provinsi Gorontalo, Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan hasil tersedianya Laporan Status Lingkungan Hidup Gorontalo (SLHD) tahun 2016, Laporan Environment Quality Index (EQI) dan tersusunnya laporan SPM bidang LH tahun 2016, kondisi kualitas udara ambiet di Kab/Kota masih baik, gambaran Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone: Cemar Ringan – sedang, sungai, Biyonga: cemar ringan-sedang, sungai Paguyaman: cemar ringan-sedang, sungai



Buladu: cemar sedang-berat, sungai Taluduyunu: cemar ringan-sedang, sungai Andagile Atinggola: cemar ringan-sedang, sungai Randangan pohuwato: cemar ringan-sedang. Disamping itu dilakukan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir, pembinaan kegiatan atau usaha untuk peningkatan penilaian kinerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan pada kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan.

Selain itu, juga telah dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan data dan informasi lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten dan kota dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Isu - isu yang menjadi perhatian dalam bidang lingkungan hidup di provinsi Gorontalo untuk kedepan adalah kerusakan Danau Limboto, penurunan kualitas air Danau Limboto, pencemaran air sungai, kerusakan mangrove dan terumbu karang, tingkat ketaataan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.

Disamping itu untuk revitalisasi danau limboto yang dilaksanakan mulai Tahun 2014. Untuk tahap awal dilakukan pengerukan danau limboto, pembersihan enceng gondok, dan pembangunan tanggul pencegah banjir yang kemudian dilanjutkan di tahun 2015 sampai dengan 2016 dilakukan pekerjaan pengerukan dan pembangunan tanggul pembatas.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan, KUMKM dan pariwisata merupakan sektor yang strategis untuk membangun dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.

a. Sektor Pertanian

Prioritas Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan luas panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo antara lain bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan



nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip *zero waste* melalui *reduce, re-use dan re-cycle*.

Dari prioritas pengembangan tersebut, pencapaian kinerja sektor pertanian di tahun 2016 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2016 (ASEM) sebesar 345.263 ton Gabah Kering Giling (GKG) meningkat 14.043 ton dibanding angka tetap tahun 2015 sebesar 331.220 ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian produksi padi untuk tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 328.521 ton. Namun demikian peningkatan produksi ini berbanding terbalik dengan produktivitas dimana terjadi penurunan produktivitas pada dari 55,51 Ku/ha tahun 2015, mengalami penurunan tahun 2016 sebesar 52,16 Ku/ha.

Hal ini disebabkan tahun 2016 Provinsi Gorontalo mendapat bantuan benih Padi Sawah seluas 71.140 ha yang terdiri dari : APBD I seluas 11.000 ha menurun 6.000 ha dibanding tahun 2015, dari anggaran APBN mendapat bantuan benih padi sebanyak 54.000 ha yang terdiri dari bantuan padi in hibrida untuk ekstensifikasi 15.000 ha, intensifikasi 39.000 ha, teknologi hazton 100 ha dan padi organik 40 ha. Peningkatan luas tanam dan luas panen meningkatkan total produksi padi secara keseluruhan. Meskipun produktivitas menurun tetapi karena luas panen meningkat maka total produksi padi meningkat.

Produksi jagung tahun 2016 (ASEM) mencapai 911.341 ton pipilan kering, capaian produksi jagung tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 927.436 ton, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari angka tetap tahun 2015 sebesar 643.512 ton pipilan kering. Bantuan benih jagung dari anggaran APBD 2016 sebanyak 7.000 ha dan APBN sebanyak 77.000 ha ditanam pada periode musim tanam I dan II. Selanjutnya untuk musim tanam III (September-Desember) mendapat tambahan anggaran APBDP 4.000 ha dan APBNP 25.000 ha (full paket). Tetapi karena pengadaan benih jagung untuk APBDP mengalami keterlambatan sehingga penanaman yang semestinya bulan September bergeser penanaman menjadi bulan Oktober 2016 dan berakibat panen dan berproduksi nanti di Januari 2017.

Produksi kedelai tahun 2016 (ASEM) sebesar 3.910 ton juga mengalami peningkatan dibanding produksi tahun 2015 sebesar 3.203 ton biji kering. Produksi kedelai untuk tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 2.502 ton pertahun. Sementara produktivitas kedelai 2016 mencapai 15,68 Ku/ha, mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 13,48 Ku/ha.

Jumlah produksi Cabe dari Angka Sementara (ASEM) 2016 sebesar 9.326 Ton (67%) tetapi dibanding tahun 2015 yang hanya 8.941 ton meningkat 385 ton.



Peningkatan ini disebabkan Adanya bantuan dari pemerintah baik melalui dana APBN, APBD dan APBN-P, yang di salurkan ke Kabupaten Kota. Bantuan tersebut bukan hanya bibit seperti beberapa tahun lalu, tetapi di lengkapi dengan sarana dan prasarana berupa alkon, mulsa plastik dan shading nett, dan juga benih di salurkan pada bulan April 2016, penanaman dilaksanakan pada Mei – Juni, Panen di bulan July – agustus, dimana kondisi Gorontalo dalam keadaan musim panas, dengan bantuan alat dan mesin untuk pengairan lahan cabe rawit, sehingga produksinya meningkat. Tidak tercapainya target produksi sesuai Renstra karena tidak tercapainya total luas panen. Namun produksi sebanyak 9.326 ton untuk kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo sudah tercukupi.

Produksi Buah-buahan sesuai ASEM 2016 BPS sebesar 14.523 Ton atau naik sebesar 4% dari target renstra. Hal ini disebabkan tanaman buah bantuan tahun 2012-2013 mulai berbuah nanti tahun 2016-2017 ini.

Total produksi tanaman sayuran tidak mencapai target hanya 57% dari target renstra, namun jika dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 12.70 meningkat tajam. Hal ini disebabkan beberapa komoditi sayuran meningkat produksi seperti Bawang Merah meningkat dari produksi 1.121 Ton dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 303 Ton, Tanaman Tomat yang 1.106 ton

Tanaman obat/biofarmaka belum mencapai target yaitu hanya 28% ini disebabkan petani masih kurang berminat dalam pembudidayaan tanaman biofarmaka, selain itu bantuan dari pemerintah yang sangat minim dari APBD hanya menganggarkan benih jahe 200 kg saja.

Ketahanan Pangan, kestabilan ekonomi suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ketahanan pangan, sehingga ketahanan pangan fungsinya menjadi sangat penting dan strategis. Ketahanan pangan identik dengan bagaimana menjaga ketersediaan pangan serta kemampuan rumah tangga dalam mengaksesnya. Sehingga ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) yang terbagi atas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Skor PPH Ketersediaan menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan di daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2015 mencapai 74,2 capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 62,81, namun angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015 yakni sebesar 88,5, sementara target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 94,3. Demikian halnya dengan skor PPH Konsumsi merupakan parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam. Hasil analisa yang



ditunjukkan bahwa pola konsumsi pangan tahun 2016 mencapai 79,4 capaian ini lebih baik dibanding tahun 2015 sebesar 72,8. Skor PPH Konsumsi Gorontalo juga masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 84,7. Capaian Skor PPH Ketersediaan maupun konsumsi Provinsi Gorontalo belum mencapai Standar Pelayanan Minimal 90 serta skor PPH ideal 100 point.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan ketersediaan bahan makanan adalah dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian.

Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih dan Pupuk, Perbaikan Jaringan Irigasi, Pengembangan Optimasi Lahan, Bantuan Alsintan Pra Panen dan Pasca Panen, Bantuan Bangunan dan Revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan TNI. Sementara untuk peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan bantuan alat tangkap seperti perahu fiber <5GT bermesin temple 15 PK, dan <3 GT bermesin katinting 9 PK, bantuan katinting 5 PKm, bantuan sarana produksi perikanan budidaya air payau, bantuan pupuk dan pakan ikan untuk pembudidaya, bantuan sarana produksi pembudidayaan ikan untuk pembudidaya. Khususnya dalam mendorong peningkatan produksi telah terbukti mengungkit pencapaian produksi, namun kedepan dengan berbagai tantangan yang lebih beragam maka diperlukan penyempurnaan dan atau peningkatan kualitas baik pada tatanan perencanaan dan operasionalisasi di lapangan.

Implikasi dari pencapaian kinerja sektor pertanian tersebut terlihat berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Gorontalo pada Desember 2016 105,95 persen, mengalami kenaikan dibanding NTP Desember 2015 sebesar 104,77 dan NTP November 2016 sebesar 105,77. Kenaikan NTP pada Desember 2015 disebabkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan indeks harga hasil produksi pertanian.

Pada periode Januari 2016 – Desember 2016, NTP Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada bulan Oktober 2016 sebesar 106,46 dan terendah terjadi pada bulan April 2016 sebesar 100,26. Kenaikan NTP Desember 2016, disebabkan oleh naiknya subsektor tanaman pangan sebesar 1,38 persen, dan subsector perikanan sebesar 1,16 persen. Sedangkan 3 subsektor lainnya mengalami penurunan indeks yaitu subsector tanaman hortikultura sebesar -0,05 persen, subsector tanaman



perkebunan rakyat sebesar -0,83 persen, dan subsector peternakan sebesar -0,36 persen.

Pengembangan pertanian juga dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi dan pemberdayaan penyuluh, di tahun 2016 masih dilakukan peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluh dengan penyediaan demplot Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebanyak 22 unit dan sebanyak 77 Unit lembaga penyuluh difasilitasi dan dikembangkan, serta peningkatan kelas kemampuan kelompok sebanyak 146 kelompok. Kemudian dilakukan juga peningkatan kapasitas penyuluh PPK melalui diklat fungsional sebanyak 30 orang dan diklat teknis bagi 30 penyuluh serta diklat teknis pelaku utama dan pelaku usaha sebanyak 30 orang.

Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi. Dari upaya tersebut populasi ternak sapi mengalami peningkatan dari 197.124 ekor tahun 2015 menjadi 207.969 ekor ditahun 2016, belum mencapai target populasi tahun 2016 sebanyak 223.704 ekor.

Untuk populasi kambing pada tahun 2016 sebesar 88.426 ekor mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 84.868 ekor. Populasi kambing tahun 2016 juga belum mencapai target sebesar 96.881. Untuk Populasi ternak ayam buras tahun 2016 sebesar 1.759.516 ekor, mengalami penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 1.850.163. populasi tahun 2016 untuk ternak ayam juga belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.932.405 ekor. Belum tercapainya target Populasi ternak Sapi, Kambing dan Ayam disebabkan karena masih rendahnya produktifitas ternak yang ada sebagai akibat dari rendahnya kualitas genetic ternak. Disamping itu, system budidaya ternak yang baik (*Good Farming Practice*) belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat.

Untuk menunjang peningkatan populasi ternak maupun produksi daging tersebut dilakukan upaya Pemeriksaan Produk Hasil Pangan ASUH (PMSR-CM) di Laboratorium Kesmavet sebanyak 384 sampel, Pengendalian dan pengobatan penyakit hewan menular strategis (PMHS) tahun 2016 sebanyak 16.565 ekor dari yang ditargetkan 9.328 ekor. Pengembangan Kelompok Ternak Sapi sebanyak 4.255 kelompok, Pengembangan Kelompok Ternak Kambing sebanyak 44 kelompok serta Pengembangan Kelompok Ternak Ayam Buras sebanyak 515 kelompok ditahun 2016.

Sementara untuk asupan protein hewani dari jumlah konsumsi daging ditahun 2016 sebesar 2,2 kg/kapita/thn, artinya terjadi penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 3,1, kg/kapita/tahun, dan belum mencapai target 2016 sebesar 3,7 kg/kapita/tahun. Hal ini terjadi karena kenaikan harga daging, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi ikan daripada daging.



Pengembangan bidang perkebunan juga terus di tingkatkan melalui Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan. Dari upaya tersebut kinerja perkebunan tahun 2016 untuk perluasan areal kelapa mencapai 67.489 Ha, melebihi target yang ditetapkan sebesar 67.487 dengan produksi kelapa dalam sebesar 60.932 ton dari target sebesar 62.494 ton. Untuk produksi kakao di tahun 2016 mencapai 4.564,6 ton melebihi target 2016 sebesar 4.082 ton, dari luas areal tanaman kakao untuk tahun 2016 seluas 15.882 Ha. Sementara untuk produksi tebu Tahun 2016 sebesar 49.331 ton dari target sebesar 31.297 ton. Pencapaian sektor perkebunan ini di hasilkan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi perwilayahan di Provinsi Gorontalo yang meliputi kelapa, kakao, cengkeh dan tebu dan revitalisasi pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui pola sistem kebersamaan ekonomi. Dalam meningkatkan kinerjanya di sektor peternakan dan perkebunan serta membangun sinergi dengan pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat Dinas Peternakan dan Perkebunan menjadi leading sektor dalam pengembangan pertanian secara terpadu yang dilakukan dengan pembagian kluster pada wilayah-wilayah potensial.

Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar yang dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan laut seram potensinya mencapai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun. Sedangkan untuk perikanan Budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun. Berdasarkan hal tersebut sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pengembangannya hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang berada dan menetap diwilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan dan kelautan.

Dari program peningkatan produksi perikanan tangkap yang dilakukan, realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2015 yang hanya mencapai 105.715 Ton meningkat produksinya tahun 2016 hingga mencapai 115.873 Ton atau naik sebesar 9,60 persen. Untuk produksi perikanan Budidaya juga mengalami peningkatan dari 63.131,22 Ton ditahun 2015 naik menjadi 100.245 ton di tahun 2016, jumlah tersebut terdiri dari produksi ikan budidaya dengan capaian 38.295 Ton, dan rumput laut dengan jumlah produksi 61.950 ton.

Tabel 2.17
Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perikanan Tangkap	85.815	92.171,3	103.017,80	105.715	115.873
2	Perikanan Budidaya	133.340	125.654,50	57.392,30	63.131,22	100.245
	- Produksi Ikan	26.668	21.730,30	32.457	26.363,92	38.295



	Budidaya					
	-Produksi rumput laut	106.672	103.924,20	24.935,30	36.767,30	61.950
	Total (Tangkap dan Budidaya)	219.155	217.825,80	160.410,10	168.848,22	215.918

Sumber : Dinas Perikanan Kelautan provinsi Gorontalo, 2017

Sedangkan dilihat dari hubungan target dan realisasi pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap mencapai 101,13 persen telah melebihi target tahun 2016 sebesar 114.578 ton. Untuk Produksi Perikanan Budidaya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 186.490 ton, realisasi produksi hanya mencapai 100.245 Ton atau persentase capaiannya hanya sebesar 53,75 persen. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang sulit diprediksi.

Tabel 2.18
Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2016

No.	Tahun	Perikanan Tangkap (Ton)			Perikanan Budidaya (Ton)		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2012	85.567	85.815	100,30	133.340	133.340	100
2	2013	90.964	92.171	101,33	144.007	125.654	87,26
3	2014	97.331	103.017,8	105,84	156.248	57.392,3	36,73
4	2015	105.118	105.715	100,55	170.310	63.131	37,07
5	2016	114.578	115.873	101,13	186.490	100.245	53,75

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, 2017

Sementara itu produksi perikanan oleh kelompok nelayan dan pembudidaya pada tahun 2016 adalah sebesar 110.250 ton, hasil ini tidak mencapai target yang ingin dicapai sebesar 110.807 ton. Produksi perikanan ini adalah terdiri dari produksi perikanan laut dan produksi perikanan budidaya.

Dari capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tahun 2016 ini memberikan kontribusi pendapatan rata-rata bagi nelayan sebesar Rp. 2.700.000 per bulannya dan bagi pembudidaya rata-rata sebesar 2.500.000 per bulannya. Capaian rata-rata pendapatan nelayan dan pembudidaya pada tahun 2016 melebihi target yang ditetapkan yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.648.545 untuk pendapatan nelayan, dan Rp. 2.278.085 untuk pendapatan pembudidaya. Sementara untuk pendapatan pengolah dan pemasar perikanan sebesar Rp. 3.400.000/bulan. Selain itu, tingkat capaian konsumsi ikan pada tahun 2016 mencapai 55,7 kg/kapita/thn, artinya sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 55 kg/kapita/thn.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan dan peningkatan kehidupan dilakukan beberapa strategi yaitu, dengan melakukan Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan Sarana Produksi Perikanan Tangkap berupa Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat tangkapnya. Langkah ini



diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 persen) armada tangkap di Provinsi Gorontalo masih berstatus dibawah > 30 GT (perahu tanpa motor dan motor tempel) dan kesemuanya dimiliki oleh nelayan kecil (nelayan tradisional). Dengan kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan mampu menghasilkan produksi yang optimal. Apalagi para nelayan juga masih tergantung pada kondisi musim, dan cuaca, yang artinya bisa dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal yang memadai dan modern, maka sulit bagi nelayan untuk bisa meningkatkan hasil produksinya, dan produktivitas.

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 tetap diarahkan untuk membangun kesiapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menghadapi tantangan, mengatasi permasalahan pembangunan perikanan budidaya dan mendayagunakan potensi sumberdaya lahan budidaya untuk mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi perikanan berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pembudidaya di pedesaan.

Intervensi anggaran diarahkan untuk melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan diimplementasikan kedalam tiga kegiatan yang mengacu pada pengembangan tiga kawasan perikanan budidaya yaitu (1). Pengembangan kawasan budidaya air tawar ; (2). Pengembangan Kawasan budidaya air payau dan : (3). Pengembangan kawasan budidaya air payau.

Dari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan budidaya yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu (1). Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Laut/Payau dan Operasional UPTD Balai Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau (BPBLP) melalui Penyediaan Benih ikan, bibit rumput laut dan pakan ikan) bagi Pembudidaya kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR); (2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standart CBIB.

Dalam rangka peningkatan kualitas pembudidaya, pemerintah Provinsi telah melakukan pembinaan kelompok pembudidaya, sampai dengan tahun 2016 sebanyak 313 kelompok pembudidaya yang telah tersertifikasi di Provinsi Gorontalo. Disamping itu dengan melaksanakan program PUMP perikanan budidaya, yang bertujuan untuk Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya yaitu terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri.



Disamping kegiatan tersebut, pemerintah provinsi juga mendesain Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT) yang merupakan Prigram Inovasi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir. Program PDNT ini merupakan salah satu program yang sangat penting, untuk tahun 2016 Program PDNT mencakup 16 desa. Pada pelaksanaan program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo selain memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin katinting, perahu, alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Waserda (warung serba ada) bagi kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan. Kegiatan ini juga mengakomodir bahwa program perikanan dan kelautan juga diharapkan berbasis pada pemenuhan kebutuhan gender. Pada tahun 2016 realisasi cakupan bina kelompok mencapai 680 kelompok meningkat sebesar 120,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar 565 kelompok.

Selain Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), Pemerintah Provinsi Gorontalo pada program kelautan dan pesisir juga mengalokasikan anggaran pada kegiatan program usaha garam rakyat (PUGAR) yang berlokasi di kec, Wonggarasi Kab. Pohuwato.

b. Sektor Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan pada tahun 2016 dilakukan dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk mengurangi isu pemanasan global seluas dengan metode areal model usaha tani melalui pemberdayaan masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan sebanyak 40.000 bibit yang disalurkan kepada masyarakat umum dan kelompok tani secara gratis. Sedangkan untuk menjaga kelestarian kondisi hutan dilakukan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melakukan pembinaan dan pemantapan hutan tanaman rakyat (HTR) kepada 2 kelompok HTR atau seluas 40 Ha HTR.

Dari kebijakan pemerintah sector kehutanan, luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ditangani tahun 2016 sebesar 39.112 Ha, melampaui target sebesar 16.200 Ha. Sementara produksi hasil hutan terdiri dari kayu bulat dengan nilai produksi pada tahun 2016 mencapai 93.293,61 M³ meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 57.750 M³, sedangkan untuk kayu gergajian produksi di tahun 2016 mencapai 39.558,96 M³ lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 17.850 M³, dan produksi non kayu tahun 2016 sebesar 15.973 M³.

c. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan.

Dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetap dilakukan pengembangan koperasi dan UMKM yang pada tahun 2016 dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan strategis dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi baik kepada koperasi aktif maupun tidak aktif, juga terhadap kelompok masyarakat atau badan usaha yang hendak membentuk koperasi baru dan pembentukan koperasi. Dari upaya tersebut, maka tahun 2016 persentase pencapaian kinerja pembentukan koperasi berkualitas, mandiri dan berprestasi sebesar 100% yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 unit koperasi, dan koperasi yang berkualitas sebanyak 20 koperasi, yang tersebar di 6 kabupaten/kota, jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 1.209 unit koperasi dari yang ditargetkan 1.105 koperasi.

Sejalan dengan itu, pembangunan koperasi di Gorontalo perlu diberengi dengan upaya dan kerja keras semua pihak terkait, utamanya dalam rangka merevitalisasi kembali koperasi yang sudah tidak beroperasi, dimana pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 551 koperasi tidak aktif, atau 45,57% dari total jumlah koperasi di Gorontalo, sebagaimana ditunjukkan data berikut ini.

Tabel 2.19
Data Keragaan Koperasi per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo tahun 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota			Tenaga Kerja		
	Aktif	Tidak Aktif	Total	L	P	Total	L	P	Total
Kota Gorontalo	159	134	293	18.628	18.579	37.207	404	222	626
Kab. Gorontalo	190	205	395	23.236	16.429	39.665	736	415	1.151
Kab. Boalemo	81	61	142	11.050	6.392	17.442	192	89	281
Kab. Pohuwato	87	36	123	6.563	3.916	10.479	33	38	71
Kab. Bone Bolango	77	56	133	11.943	4.918	16.861	323	108	340
Kab. Gorontalo	59	51	110	5.259	4.936	10.195	93	63	156
Prov Gorontalo	27	13	40	2.134	720	2.854	187	25	212

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan fasilitasi permodalan kepada masyarakat baik melalui KUR maupun skim kredit lainnya dengan total realisasi KUR sebesar Rp. 488.562.753.800,00, juga dilakukan pemberian modal dari pemerintah. Kemudian disediakan juga informasi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional, sehingga di tahun 2016 melalui upaya tersebut jumlah UMKM meningkat menjadi 98.054 UMKM dari target yang ditetapkan sebesar 68.829 UMKM. Sementara jumlah KUKM yang mengakses Kredit Usaha Rakyat yang dikelola Pemerintah Provinsi sebanyak 82.879 KUKM.

d. Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk pengembangan perdagangan di tahun 2016 masih telah dilakukan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan ekspor,



melakukan upaya efisiensi perdagangan dalam negeri dan melakukan upaya dalam meningkatkan standarisasi mutu barang. Sehingga dari upaya tersebut di tahun 2016 beberapa hasil pencapaiannya dapat ditunjukkan dari perkembangan ekspor menjadi 148.520,19 ton di tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 144.291 ton, namun untuk perdagangan antar pulau ditahun 2016 mengalami pelemahan menjadi sebesar 120.118 ton dari capaian tahun 2015 yang mencapai 620.902 ton. Selain itu untuk menjamin kualitas komoditi yang akan diperdagangkan dilakukan pengujian komoditi oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang mencapai 380 kali pengujian serta penerbitan sertifikat mutu sebanyak 62 sertifikat.

Dalam meningkatkan distribusi Barang/Jasa di tahun 2016 telah dilakukan revitalisasi pasar sebanyak 3 unit pasar tradisional. Disamping itu dari sisi pelayanan Pemerintah provinsi di tahun 2016 juga membantu penanganan kasus pengaduan konsumen, yang diindikasikan dengan pemberkasan dan penanganan kasus pengaduan konsumen terhadap seluruh kasus yang diajukan. Kemudian dilaksanakan tera dan tera ulang alat Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) sebanyak 2.810 UTTP. Dalam rangka perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan dilaksanakan Pasar Tertib Ukur, yang diindikasikan dengan tercapainya 5 Pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo, sehingga total pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo berjumlah 20 Pasar.

Untuk mengembangkan sektor perindustrian pada tahun 2016 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah diupayakan melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, fasilitasi wirausaha baru IKM, disamping itu pengembangan kompetensi inti One Village One Product (OVOP) dan kluster industri juga dilakukan dalam meningkatkan produktivitas produk IKM. Dari upaya yang dilakukan tersebut telah meningkatkan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi sebanyak 14.339 unit di tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah IKM ditahun 2015 yang hanya 14.084 unit dan jumlah sentra IKM sebanyak 297 ditahun 2016, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan IKM Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016

No	Uraian	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah IKM(Unit)	12.360	12.921	13.688	14.084	14.339
	-Industri Mikro Kecil	11.909	12.470	13.237	13.633	12.924
	- Industri Kecil	436	436	436	436	1.331
	-Industri Menengah	15	15	15	15	82
2	Jumlah Tenaga Kerja (Org)	31.910	34.564	36.978	36.817	35.620
3	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	132,94	134,14	150,23	180,74	187,52
4	Nilai Produksi (Milyar Rupiah)	510,02	476,00	530,84	548,31	538,44

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

Sementara untuk realisasi penciptaan WUB diperoleh persentasi capaian indikator sasaran sebesar 0%, yang dihasilkan dari target penciptaan WUB sebanyak 1.000 UMKM. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja hasil tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari APBD, dimana pada pasal 6 ayat (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk Koperasi dan UMKM tidak dapat lagi diberikan lagi Hibah dan Bansos.

e. Pariwisata dan Budaya

Dilihat dari segi potensi pariwisata, Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi wisata yang beragam yang tersebar di seluruh wilayah dimana potensi tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Namun demikian sector pariwisata perlu dikembangkan, dan dikelola secara terpadu dan menyeluruh. Sector pariwisata telah berkontribusi terhadap peningkatan PDRB Provinsi Gorontalo, namun keunggulan kompetitif ini hingga saat ini belum mampu mendorong ekonomi masyarakat di lokasi obyek wisata tersebut.

Dalam penyelenggaraan urusan pariwisata di tahun 2016 dari 8 obyek wisata unggulan Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 telah dikembangkan pada 3 obyek wisata unggulan yaitu 3 (tiga) obyek wisata yakni Olele, Botutonuo, dan Monano serta DED Obyek Wisata Lombongo dan pada tahun 2017 akan dikembangkan pada 4 Obyek Wisata yaitu Obyek Wisata Hiu Paus Botubarani di Kab. Bone Bolango, Obyek Wisata Pentadio Resort di Kab. Gorontalo, Obyek Wisata Iluta di Kab. Gorontalo dan Obyek Wisata Religi Bongo di Kab. Gorontalo

Dalam pengembangan sector pariwisata dapat dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat. Pola pengembangan ini kemudian dikenal dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT). Adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (*local way of life*). CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal.

Dari upaya - upaya tersebut diperoleh capaian dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Gorontalo sebanyak 370.000 wisatawan di tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 368.000 wisatawan, Sedangkan realisasi lama tinggal rata-rata wisatawan sebanyak 4 hari (data dari Kab/Kota)

telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini mengalami peningkatan jumlah kunjungan dari target yang direncanakan sebagai implikasi dari adanya penyediaan dan pembenahan pada beberapa obyek wisata unggulan seperti Obyek wisata Olele, Botutonuo, Monano, Obyek Wisata Bahari Kota Gorontalo. Di tahun 2017 diperkirakan juga akan melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 120.000 wisatawan (2500 wisman dan 117.500 wisnus)

Disamping itu kegiatan budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata telah teralisasi sebanyak 8 (delapan) kegiatan dari 5 (lima) kegiatan yang telah ditargetkan. Kegiatan tersebut yaitu Festival Karnaval Khatulistiwa, Festival tumbilotohe, Pemilihan Nou dan Uti, Bugar Wisata, Festival Beduk, Semarak Ketupat, Karapan Sapi dan Festival Tulude.

f. Pertambangan

Potensi pertambangan di provinsi Gorontalo cukup tinggi, baik itu komoditas logam maupun batuan dan non logam yang tersebar hampir di semua wilayah Gorontalo. Potensi komoditas logam terdiri dari emas yang tereka sebesar 218.133.132.151,07 ton yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi perak tereka sebesar 217.463.591.225,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi tembaga tereka sebesar 217.976.091.224,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Kemudian untuk potensi pertambangan dengan komoditi batuan dan non logam terdiri atas batuan andesit sebesar 2.506.000.000 ton, granit sebesar 888.500.000 ton, Dasit sebesar 1.776.125.000 ton, Basal sebesar 1.000.000.000 ton, batu gamping sebesar 19.948.748.500 ton, felspar sebesar 2.500.000 ton, lempung 750.000.000 ton, pasir batu & sirtu sebesar 282.250.000 ton, marmer 18.869,96 ton dan toseki sebesar 51.247.568,62 ton. Dari potensi yang ada tersebut, maka di tahun 2016 dalam rangka peningkatan pengamanan dan perlindungan terhadap sumberdaya hutan, sumberdaya mineral dan energi, peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, mineral dan energi serta memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan dan areal pertambangan di Provinsi Gorontalo dilakukan survey pendahuluan potensi calon lokasi wilayah pertambangan rakyat. Dari kebijakan dimaksud, diperoleh Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina mencapai 35,53 di tahun 2016, capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 31,76 persen.

2.1.4.2. Infrastruktur Wilayah

a. Infrastruktur Transportasi

Dalam bidang transportasi pembangunan dilakukan melalui pengelolaan Jalan Provinsi hingga tahun 2016 sepanjang 432,51 km. Pada tahun 2016 untuk menjaga



kemantapan jalan dan jembatan telah dilakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi sepanjang 3,29 Km. Panjang jalan provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 18,52 kilometer, sedangkan panjang jalan strategis provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 16,54 kilometer. Disamping itu pembangunan jembatan diruas jalan strategis Provinsi sebanyak 1 (satu) buah. Sehingga diperoleh kondisi kemantapan jalan Provinsi sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 41,15%, sementara untuk kondisi kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo sebesar 86,48%.

Dari pengembangan tersebut, hingga tahun 2016 kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 209,00 Km, kondisi sedang 15,80 Km, kondisi rusak ringan 24,43 Km, kondisi rusak berat 73,33 Km, dan jalan yang belum tembus/terbuka masih sepanjang 109,95 Km, kondisi tersebut meningkat dibanding tahun 2015 dimana kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 196,57 Km, kondisi sedang 21,05 Km, kondisi rusak ringan 27,43 Km, kondisi rusak berat 77,51 Km.

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi melalui dinas Perhubungan untuk tahun 2016 ditingkatkan pelayanan angkutan darat perintis melalui 4 lintasan perintis (Gorontalo-Pangea, Gorontalo-Mohiyolo, Terminal Isimu Mulyonegoro-Satria, Gorontalo-Pancakarsa) serta pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ pada tahun 2016 sebanyak 2 ruas jalan, APILL 4 unit.

Provinsi Gorontalo memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek yang di khususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-Toli Sulawesi Tengah. Sedangkan dipesisir selatan terdapat pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Kelima pelabuhan tersebut terus dilakukan upaya pengembangannya baik melalui APBN maupun APBD. Capaian peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo tahun 2016 telah mencapai rata - rata 4.419 ton/hari mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 5.076 ton/hari, melebihi target RPJMD sebesar 2.900 ton/hari. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan produktifitas pada seluruh Pelabuhan di Provinsi Gorontalo (Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tilamuta dan Pelabuhan Bumbulan), seperti di Pelabuhan Tilamuta dimana kapal pengangkut semen sudah bisa bersandar di pelabuhan tersebut sehingga terjadi peningkatan produktifitas yang cukup signifikan pada pelabuhan tersebut. Untuk Pelabuhan Anggrek, masih banyak kapal yang antrian sehingga dibutuhkan penambahan dermaga serta



penambahan sarana penunjang seperti peralatan bongkar muat. Untuk kapasitas layanan kapal di pelabuhan sudah mencapai 12.000 DWT.

Pengembangan transportasi udara di Provinsi Gorontalo terus diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Djalaluddin, dimana pada tahun 2016 Bandara Djalaludin dengan status bandara Nasional kelas II C dengan luas 11.865 m² telah diresmikan dan mulai beroperasi, kapasitas landasan dapat didarati Boeing 737, Run Way panjang 2.500 m x 45 m, Taxiway 2 buah ukuran 115 m x 23 m, Apron ukuran 231,5 m x 80 m untuk kapasitas parkir 2 (dua) buah pesawat. Sementara untuk pengembangan selanjutnya adalah Perluasan Runway Bandara Djalaluddin Gorontalo dan Pembangunan Bandara Pohnuato.

b. Sumberdaya Air dan Irigasi

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi serta jaringan lainnya, maka hingga tahun 2016 diprioritaskan pada 7 Daerah Irigasi yang bersumber dari APBD yang terdiri dari Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Bulia, Huludupitango, Tolinggula, Tabulo/Latula, Taluduyunu, Pilohayanga, dan Irigasi Bongo.

Pada tahun 2016 dilakukan rehabilitasi dan peningkatan luas areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 11.792 meter, dan juga dilakukan operasi dan pemeliharaan areal jaringan irigasi pertanian sepanjang 17.131 Ha.

Untuk menjaga dampak erosi, longsor dan sedimentasi yang akan masuk ke areal pertanian, persawahan dan pemukiman dilakukan pembangunan tebing - tebing di badan sungai sepanjang 426,6 Meter. Juga dibangun tanggul pengaman pantai bagi pemukiman masyarakat pesisir sepanjang 405 Meter. Pembangunan Penahan tebing sungai tersebut dilakukan pada 24 lokasi masing-masing pada Sungai Taluduyun, Padengo, Bone, Mohiyolo, Luwohu, Timbuolo, Juria, Molotabu, Wapo, Panca Karsa, Boliyohuto, Bakti, Alo, Tilamuta, Pentadu, Keramat, Telaga Biru, Botutonuo, Bolihutuo (2 paket), Leboto, Bone-padebuolo, Dembe, Bongopini; Normalisasi Sungai pada 4 lokasi yaitu Sungai Menggelomo, Lonuo, Latula dan serdadu dan Galian endapan lanjutan pada cekdam Buliide; sedangkan Untuk pengaman abrasi pantai diprioritaskan pada 3 kawasan (Pantai Selatan bagian Timur, Tengah dan Barat) yaitu Pengaman Abrasi Pantai Desa Taludaa, Pelita Jaya, Molamahu, Leato, Bilato dan Tutulo.

c. Pemukiman

Dalam urusan pemukiman Pemerintah Provinsi telah melakukan penanganan kawasan pemukiman melalui pembangunan jalan lingkungan di kawasan RSH, kawasan pemukiman kumuh nelayan, kawasan kumuh perkotaan yang telah mencapai lebih kurang 30.822 meter. Juga telah di bangun jalan pada kawasan agropolitan dan jalan pada Desa-Desa potensial sepanjang 19,64 km, diatas target



yang ditetapkan sepanjang 17 Km, serta penyediaan air bersih dan sanitasi untuk pencapaian target MDGs. Untuk tahun 2015 telah dilakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak kurang lebih 711 unit Mahyani dan tahun 2016 sebanyak 861 unit dari target yang ditetapkan 1.000 unit yang tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Disamping itu untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi membangun infrastruktur dasar untuk 59 desa tertinggal. Dari upaya yang dilakukan tersebut, capaian indikator dalam mewujudkan desa maju dan mandiri dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 3 desa dan 3 kelurahan.

d. Persampahan dan Sanitasi

Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dilakukan dengan pembangunan pengelolaan persampahan secara terpadu. Disamping itu juga telah dibangun tempat pembuangan akhir (TPA) Talumelito yang diperuntukkan untuk melayani 2 (dua) wilayah yaitu kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan kapasitas tampung kurang lebih 355.670 m³. TPA tersebut telah beroperasi dengan sistem sanitari landfill dan juga berfungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah (KIPS). Sampai saat ini di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan sistem *sanitari landfill* yang konstruksinya dibiayai oleh dana APBN, sedangkan pembebasan lahan dan fasilitas pelengkap lainnya dibiayai oleh APBD kabupaten.

Adapun kebutuhan untuk layanan daya tampung TPA 5 (lima) tahun kedepan adalah + 4.745.000 m³, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang ramah lingkungan + 4.089.849 m³. Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA tersebut maka dibutuhkan pembangunan baru di Kab. Bone Bolango serta pengembangan sarana prasarana TPA yang ada saat ini. Khusus TPA Talumelito diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pada tahun 2016 dilaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman sebanyak 55 unit yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Program PPSP dimaksudkan sebagai program pembangunan sanitasi menyeluruh yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, dimana pembangunan dan pengelolaan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah diseluruh tingkatan masyarakat.

e. Air Minum dan Air Bersih

Tahun 2016 Jumlah Sambungan rumah (SR) yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan sebesar 3.250 jiwa. Untuk itu realisasi s/d tahun 2016 (2012-2016) sebesar 21.428 Jiwa dari target 108.090 jiwa, serta bangunan



penyediaan sanitasi yang terbangun tahun 2016 sebanyak 55 unit, sehingga total sampai dengan tahun 2016 sebesar 348 Unit dari target renstra 546 Unit.

Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2016, pencapaian target air minum baru mencapai 69,56 persen dan untuk sanitasi layak tahun 2015 cakupan yang terlayani baru mencapai 56,27 persen.

f. Sumber Daya Energi

Hingga tahun 2016 sistem jaringan energi listrik di Provinsi Gorontalo terdiri dari 10 (sepuluh) PLTD, 1 (satu) PLTM dan 2 (dua) PLTU masing-masing PLTU Molotabu dan PLTU Angrek 2 x 25 Watt yang masih dalam proses pembangunan serta ketambahan 1 (satu) PLTG yang berlokasi di Paguat. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energy dan pengembangan ketenagalistrikan, maka di tahun 2016 dilakukan pengembangan energy terbarukan terhadap 20 unit PLTS, pemeliharaan 1 unit PLTMH dan menggalakkan program "Listrik Pintar" bekerjasama dengan PLN yang melakukan penyambungan listrik untuk rumah ibadah tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo dan pada tahun 2016 juga dilakukan sambungan baru listrik untuk rumah tangga miskin sebanyak 500 RTM. Dari upaya yang dilakukan tersebut capaian peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 78,16 persen ditahun 2016 meningkat dari tahun 2015 sebesar 77,48 persen. Dan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas kehutanan dan pertambangan melakukan fasilitasi demi terselenggaranya konversi minyak tanah ke elpiji dan melakukan pengawasan distribusi BBM dan elpiji di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air \pm 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan yang baru dimanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3,5 MW, sedangkan Potensi panas bumi Suwawa 110 MW telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang. Potensi panas bumi pentadio dengan temperature 70°C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperature 50° C, Kecamatan Botumoito dengan temperature 42° C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperature 62° C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65° C. Dengan total sumberdaya diperkirakan sebesar 160° (MWe).



g. Penataan Ruang

Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan efisien sejak tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 04 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo tahun 2010 - 2030 dan untuk tahun 2016 dilakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.

h. Pemerintahan Umum

Dalam urusan pemerintahan umum, beberapa capaian yang telah dilakukan hingga tahun 2016 adalah :

- a. Dalam rangka pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dilakukan dengan pemberian bantuan tugas belajar S-2 dan PNS provinsi, bantuan akhir studi, perbaikan sistem promosi dan analisa jabatan, penyelenggaraan diklat formal dan non formal, penataan sistem administrasi kepegawaian secara elektronik dan penerapan SIMPEG. Hingga tahun 2015 Pemerintah provinsi dapat menyelenggarakan Diklat Prajabatan, Diklat PIM IV dan Diklat PIM III yang terakreditasi masing - masing "B" untuk Prajabatan, "B" untuk diklat PIM IV dan "B" untuk diklat PIM III, juga mendiklatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-A) pada diklat LEMHANNAS sebanyak 5 orang, Diklat PIM I sebanyak 1 orang, Diklatpim II sebanyak 4 Orang, 32 Peserta Diklat PIM III dan 40 Peserta Diklat PIM IV. Disamping itu dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka tahun 2016 dilaksanakan penilaian dan penghargaan terhadap PNS Teladan dan berprestasi yang diseleksi sebanyak 105 pegawai. Sementara itu pemberian bantuan studi Belajar kepada 38 pegawai yang melanjutkan studi.
- b. Peningkatan kesejahteraan aparatur, dilakukan dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan azas berkeadilan yaitu adanya perubahan metode perhitungan TKD berdasarkan beban kerja, dimana tahun 2016 telah diterapkan metode perhitungan beban kerja dan disiplin melalui aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Kinerja (Siransija), yang dijadikan dasar dalam penilaian tunjangan kinerja daerah. Pemberian tunjangan kinerja daerah dimaksudkan untuk untuk mendorong spirit dan motivasinya dalam meningkatkan kinerja, yang berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan aparatur.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur. Pada obyek ini disediakan prasarana penunjang kegiatan perkantoran, pemberian Kendaraan Dinas Operasional (KDO) bagi pejabat eselon III serta pembangunan gedung kantor pemerintah daerah di lokasi blok plan perkantoran yang terletak di desa ayula kabupaten bone bolango yang tahun 2016 ini sudah terbangun 8 gedung dan telah digunakan.



- d. Reformasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan melalui implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis IPM, pelaksanaan kualitas Musrenbangda dengan melakukan revitalisasi mekanisme pelaksanaannya, evaluasi kecamatan IPM dibawah rata-rata Provinsi, mengadvokasi pengembangan dan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Atas kinerja tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2016 memperoleh penghargaan berupa penganugerahan Pangripta Nusantara kategori Perencanaan Progresif, selain itu dari pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan seluruh Kabupaten kota yang ada memperoleh penghargaan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2016.
- e. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media elektronik dan cetak. Keterbukaan informasi juga dilakukan dengan penyebarluasan pelaksanaan program dan kegiatan yang disebarluaskan melalui media local. Disamping itu Radio Rakyat Hulondhalo bentukan Pemerintah Provinsi menjadi wadah dalam menjangring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat.
- f. Pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan penguatan kapasitas SDM dilaksanakan Bimtek Penguatan Kapabilitas APIP Kab/Kota dalam rangka reviu RKA SKPD, laporan hasil evaluasi lakip SKPD, laporan hasil pemeriksaan dana hibah dan bantuan sosial. Sementara itu di tahun 2016 telah dilakukan penguatan kapasitas SDM pengawas dan pemeriksa bagi Auditor sebanyak 10 Orang dan aparat pengawas yang kompeten dalam pelaksanaan teknis pemeriksaan berjumlah 16 orang, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD secara berkala, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah sebanyak 46 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, peningkatan koordinasi pengawasan ditingkat Provinsi, Regional dan Nasional, identifikasi dini jenis pelanggaran dan tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (SOP).
Sebagai wujud keseriusan Pemerintah terhadap kasus korupsi, maka tahun 2016 dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo.
- g. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta



E-Report. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset diupayakan melalui penerapan aplikasi SIMDA.

Berbagai upaya penerapan teknologi informasi disegala bidang mulai digagas pemerintah Provinsi Gorontalo, mulai dari e-Monev (*electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan*), aplikasi SIMDA, e-Data, e-Monev, e-Protrack dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- h. Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, di tahun 2016 Sekretariat DPRD dalam hal memfasilitasi Legislatif telah menyelesaikan 12 (dua belas) buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah.
- i. Keberhasilan dan penghargaan ditingkat Nasional yang diperoleh pada tahun 2015-2016 adalah :
 1. Penghargaan dalam pengelolaan keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI;
 2. Terbaik I Nasional dari Menkopolkam dalam bidang Keamanan;
 3. Terbaik I Nasional dari UKP4 tentang Pengelolaan dan Penyerapan Keuangan;
 4. Penghargaan kategori Award Akselerasi Penerapan e-Procurement dari LKPP
 5. Penghargaan Kesatria Bakti Husada pada acara puncak Hari Kesehatan Nasional
 6. Penghargaan Pangripta Nusantara 2016 Kategori Perencanaan Progresif
 7. Terbaik II Pemenang Penghargaan Pencapaian Indikator MDGs Terbaik Tahun 2013-2015
 8. Terbaik III Pemenang Penghargaan Laju Pencapaian MDGs Terbaik Tahun 2013-2015

2.1.4.3. Investasi

Realisasi investasi di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah nilai investasi berskala nasional dan internasional terus meningkat, dimana pada tahun 2016 mencapai 4.145 Trilyun meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 4,112 trilyun. Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN telah mencapai 50 PMA/PMDN dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 12.234. Berbagai capaian tersebut tidak lepas dari semakin meningkatnya iklim investasi yang kondusif disertai dengan peningkatan penanganan permasalahan yang dihadapi PMA/PMDN, dan penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk penanaman modal dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan SIPD serta penyelenggaraan promosi dan peningkatan kerjasama investasi.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2016 Secara umum, komposisi umur penduduk Provinsi Gorontalo adalah 29,17 persen penduduk usia muda (0-14 tahun), 59,18 persen usia produktif 15-64 tahun dan 3,95 persen penduduk usia tua (65 tahun lebih). Dengan demikian, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 55,97 persen yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo menanggung sekitar 56 orang penduduk usia belum/tidak produktif.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif, untuk itu pada tahun 2016 melalui kegiatan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta tanpa secara langsung mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan keterampilan bagi para pencari kerja dengan tingkat pendidikan rendah terutama dikecamatan dengan IPM rendah.

2.1.5 Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Hasil capaian kinerja pembangunan daerah dapat dilihat dari Indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016
Misi Pertama, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan akselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat			
1.	Pertumbuhan Ekonomi %	7,8 – 8,3	6,52
2.	IPM	73,26	65,86 (2015)
3.	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	12.509.103	27.654.340,21
4.	Indeks Gini	0,36	0,30
5.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.)	4.069 Trilyun	4.145 Trilyun
6.	Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang dibangun & yang ditingkatkan	10 Km	18,52 Km
7.	Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Strategis provinsi	2 Buah	1 Bh
8.	Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan	5 Km	16,53 Km
9.	Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang	17.131 Ha	17.131 Ha



No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016
	dipelihara (Operasi & Pemeliharaan)		
10.	Ratio Elektrifikasi	77,75%	78,16%
Misi Kedua, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.			
1.	Angka Melek Huruf	97,00%	99,81%
2.	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	8,93	9,00
3.	Angka Kematian Ibu/100.000	102,0	301,7
4.	Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup	12,8	15,0
7.	Angka usia harapan hidup	68,6	68,6
8.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,75	2,76
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,75%	67,89%
Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat.			
1.	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	87	72,09
2.	Meningkatnya nilai tukar petani (NTP)		
	- Subsektor tanaman pangan	91,91	111,15
	- Subsektor Hortikultura	110,45	112,50
3.	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	108,41	102,65
4.	Nilai Tukar Petani Kebun	128,05	98,29
5.	Jumlah Populasi Ternak Besar (sapi/Ekor)	223.704	207.969
6.	Jumlah Konsumsi Daging (Sapi)(kg/kapita/th)	3,7	2,2
Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan.			
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	59,72	-
2.	Indeks Pembangunan Gender	67,02	-
Misi Kelima, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.			
1.	Persentase penduduk miskin (%)	14,5 - 12	17,63
2.	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan

Berdasarkan evaluasi program pembangunan terhadap indikator RPJMD 2012 dan 2017 dan data BPS Provinsi Gorontalo berdasarkan capaian Misi sebagai berikut :

Misi Pertama, Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat. Urusan yang terkait dengan misi pertama tersebut adalah